

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jepang dan negara-negara anggota ASEAN telah mengembangkan hubungan kerja sama baik di bidang politik maupun ekonomi sejak awal tahun 1970-an. Kerja sama pertama muncul pada tahun 1973 sebagai Forum Jepang–ASEAN tentang karet sintetis, sebuah dialog tingkat bisnis yang berupaya menyelesaikan perselisihan komersial antara produsen lateks ASEAN dan perusahaan karet sintetis Jepang. Di tingkat pemerintah, pengumuman Doktrin Fukuda pada tahun 1977 merupakan batu loncatan pertama bagi kerja sama Jepang-ASEAN. Doktrin Fukuda, seperangkat prinsip dasar kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara, menekankan pentingnya pembangunan Jepang. Hubungan kerja sama dengan pemerintah lain sebagai mitra setara (Akrasanee, 2003).

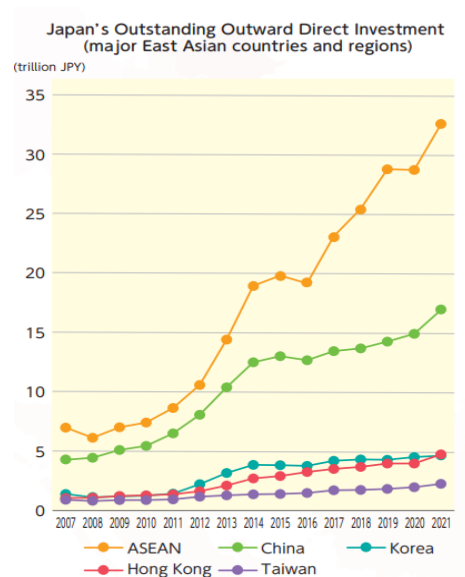
Tujuan utama hubungan Jepang dengan ASEAN adalah investasi dan perdagangan (Akrasanee, 2003). ASEAN dengan posisi strategisnya tentu dapat memberikan keuntungan bagi perdagangan Jepang. Dalam bidang ekonomi, Jepang telah bekerja sama dengan ASEAN sejak tahun 2003 untuk menciptakan Area Perdagangan Bebas (FTA) yang dapat melayani kepentingan ekonomi Jepang yang signifikan di kawasan tersebut. Negara-negara ASEAN merupakan rute utama untuk barang-barang impor Jepang. Tujuh puluh persen minyak Jepang diangkut melalui

jalur laut yang melewati Selat Malaka (dibatasi oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura) (Rowan, 2005). Selain itu, kawasan ini merupakan pasar yang signifikan untuk produk-produk Jepang dengan ASEAN menjadi mitra dagang terbesar kedua Jepang setelah Cina (Okano, 2016). Hubungan ekonomi antara Jepang dan ASEAN diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ASEAN-Jepang (AJCEP) pada tahun 2008, sebuah perjanjian perdagangan bebas yang secara signifikan menurunkan tarif antara mereka dan dapat mengarah pada integrasi ekonomi lebih lanjut di masa depan (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2017). Integrasi ekonomi seperti itu mencerminkan keinginan ASEAN untuk memasukkan Jepang dalam lingkup regionalnya karena Jepang secara konsisten mendukung pengembangan ekonomi regional di Asia Tenggara.

Negara Asia Tenggara mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pasca perang dingin, membuat investasi besar-besaran Jepang dapat dikatakan sukses (Alamsyah, 2018). Misalnya, negara ASEAN sangat bergantung pada produk manufaktur Jepang, sekitar 30% impor peralatan transportasi kawasan ini berasal dari Jepang selama tahun 2000-an (ILO). Jepang disisi lain memanfaatkan kondisi ini untuk mengeksploitasi keunggulan biaya tenaga kerja. Meskipun keterlibatan Jepang dengan Asia Tenggara mengutamakan peluang ekonomi, terutama untuk akses terhadap sumber daya. Namun, sejak 2010, perusahaan-perusahaan Jepang juga berupaya untuk memanfaatkan tenaga kerja murah

dan populasi yang berkembang di wilayah ini, seiring dengan cepatnya penuaan dan penurunan jumlah pekerja di Jepang (Alamsyah, 2018).

Lebih lanjut, perusahaan Jepang secara agresif meningkatkan FDI mereka di Negara Anggota ASEAN pada akhir 1980-an dan 1990-an. Selama periode 1988–1993, Investasi Langsung Asing (FDI) Jepang di negara-negara ASEAN mencapai lebih dari USD 22 miliar (Stubbs 1995). Pada tahun 1996, FDI Jepang di negara-negara ASEAN mencapai total USD 6,21 miliar dengan Indonesia, Singapura, dan Thailand menjadi penerima terbesar. Indonesia sendiri menyerap lebih dari USD 2,3 miliar pada tahun 1996. Pada Maret 2000, Sekretaris Jenderal ASEAN melaporkan bahwa dalam dekade terakhir, Jepang menyumbang 20 persen dari seluruh aliran net investasi langsung asing ke Asia Tenggara. Diperkirakan bahwa, selama periode 1990–1998, Jepang telah menginvestasikan lebih dari USD 52 miliar di wilayah tersebut (Lall, 1998). Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, ASEAN mendapatkan FDI terbanyak dengan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya.



Gambar 1.1 Grafik FDI Jepang di ASEAN dan Negara Asia Timur

Sumber: Kementerian Keuangan Jepang 2022

Akibatnya, kawasan Asia Tenggara diisi oleh sebagian besar jaringan produksi global perusahaan multinasional Jepang. Investasi agresif oleh perusahaan multinasional Jepang menggeser proses produksi padat karya, seperti jalur perakitan, ke lokasi asing (FDI vertikal) (ILO). Kecenderungan ini kemudian memisahkan proses produksi dan mengalihkan proses yang padat karya ke negara-negara yang memiliki banyak tenaga kerja untuk membantu mengurangi total biaya produksi dan meningkatkan skala produksi (Sato, 2014).

Keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh Jepang melalui hubungan kerjasama ekonomi dengan negara anggota ASEAN juga tergolong besar. Menurut data awal dari ASEAN, perdagangan barang total antara ASEAN dan Jepang mencapai USD 225,9 miliar pada tahun 2019, menyumbang sebesar 8,0% dari total perdagangan barang ASEAN,

sementara total aliran Investasi Langsung Asing (FDI) dari Jepang mencapai 20,4 miliar US Dollar atau 12,7% dari total aliran FDI ke ASEAN. Hal ini menjadikan Jepang sebagai mitra perdagangan terbesar keempat ASEAN dan sebagai sumber FDI eksternal terbesar kedua di antara Mitra Dialog ASEAN pada tahun 2019. Lebih lanjut, menurut laporan tahun 1998 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Jepang (MITI), sebanyak 1.119 produsen yang terafiliasi dengan Jepang memiliki operasi bisnis di ASEAN-4 dan mempekerjakan sejumlah 590.000 pekerja lokal pada 1995. Angka Perusahaan dan produsen ini meningkat menjadi 15.000 perusahaan pada tahun 2022 (Kemenperin, 2022). Penting untuk dicatat bahwa pertimbangan terkait efisiensi biaya yang berasal dari penggunaan tenaga kerja murah di ASEAN telah menjadi faktor kunci dalam strategi industri perusahaan Jepang yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam sektor otomotif, merek Jepang masih mendominasi sebanyak 80% dari kendaraan baru di Asia Tenggara (ASEAN, 2020). Mencerminkan permintaan berkelanjutan untuk mobil Jepang, ribuan kendaraan tambahan tiba di wilayah ini setiap tahun sebagai impor paralel atau kendaraan bekas. Keuntungan-keuntungan ini telah berkembang selama beberapa dekade, di mana merek-merek otomotif Barat yang lebih mapan tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Dinamika serupa terjadi dalam sektor ritel dan barang konsumen di sekitar Asia Tenggara. Aeon, sebagai contoh, merupakan peritel terbesar kedua di Malaysia dan sedang

memperluas kehadirannya di Vietnam dengan tujuan menguasai pasar kelas menengah (Nikkei Asia, 2024).

Namun alih-alih mempertahankan *status quo* interdependensi ekonomi negara-negara ASEAN kepada Jepang, terutama dalam bidang mesin dan manufaktur, Jepang justru mengubah alur kebijakan luar negerinya terhadap negara ASEAN dengan mendeklarasikan 3 arah utama Jepang dalam KTT ASEAN-Jepang yang mencangkup pemberdayaan manusia, pembenahan kelembagaan dan pengumpulan kearifan (JICA, 2018). Pada 10 Januari 2020 Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mendeklarasikan program Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative 2.0 yang didedikasikan untuk mengembangkan potensi Asia Tenggara sebagai pusat ekonomi dunia (JICA, 2018). Jepang akan membantu negara ASEAN untuk mengembangkan kualitas SDM melalui pelatihan seperti skill Teknik dan matematika, *design* dan pengembangan produk, inovasi, serta manajemen. Jepang juga memberikan dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dasar yang berfokus pada matematika dan sains. Untuk meningkatkan kesuksesan program ini, Jepang juga berdedikasi untuk membuat bantuan strategis yang dapat disesuaikan kembali dengan SDM lokal pada masing-masing negara (JICA, 2021). Pengembangan sumber daya manusia di Kawasan ASEAN tentu dapat menimbulkan polemik yang nantinya akan berdampak pada ekonomi Jepang itu sendiri.

Misalnya, dengan sumber daya yang berkualitas negara-negara ASEAN akan mengurangi jumlah ekspor bahan mentah dan memilih untuk mengolahnya terlebih dahulu. Hal ini tentu akan berdampak pada kemajuan dan minat pasar produk Jepang di ASEAN. Pendidikan dan pelatihan yang memiliki kurikulum yang berorientasi pada inovasi dan kemandirian berpikir juga memberikan kesempatan kepada negara anggota ASEAN untuk mengembangkan korporat local nya sendiri yang akan mengubah minat pekerja local. Terlebih pengembangan sumber daya manusia membutuhkan waktu, tenaga dan modal material. Dimana *status quo* yang tidak membutuhkan tambahan usaha sudah memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi Jepang. Situasi ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti, apa sebenarnya faktor yang membuat mengimplementasikan program Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative 2.0.

1.2 Rumusan masalah

Mengingat keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh Jepang dalam hubungan luar negeri dengan ASEAN, mengapa Jepang mengubah kebijakan luar negerinya dengan program Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative di kawasan ASEAN?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN melalui program Industrial Human Resource Development Cooperation Initiative 2.0.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional utamanya bagaimana dimensi non-material berupa nilai-nilai dan budaya mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang serta bagaimana konsep Kaizen dapat diaplikasikan dalam melihat dinamika hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih baru terhadap perkembangan *non-western theory* dan Global IR. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi *policy maker* negara anggota ASEAN dalam melihat perkembangan dan arah kebijakan luar negeri Jepang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam literatur *Journal of Asian Security and International Affairs* (2018) berjudul “What Does Strategic Partnerships with ASEAN Mean for Japan’s Foreign Policy” karya Dennis D. Trinidad membahas secara luas implikasi kemitraan strategis pada ODA Jepang. Penelitian ini berpendapat bahwa salah satu hasil yang diinginkan Jepang dari kemitraan ini adalah peningkatan sekuritisasi bantuan di kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini menekankan argumennya pada strategi pasifisme proaktif, piagam kerja sama

pembangunan baru, dan tiga prinsip transfer pertahanan peralatan dan teknologi memungkinkan Jepang untuk mempertahankan dan meningkatkan bantuannya. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa bantuan sekuritisasi tercermin dalam wacana, aliran, dan struktur kelembagaan bantuan baru Jepang. Piagam kerja sama pembangunan tahun 2015 telah mengubah wacana bantuan Jepang secara mendalam dan strategis. Yang paling menonjol adalah penggunaan istilah 'kerja sama pembangunan' alih-alih 'bantuan pembangunan' tradisional. Kerja sama pembangunan berkonotasi 'kemitraan', 'kolaborasi', 'saling menguntungkan', 'kesetaraan' dan 'win-win', sebagai tujuan pemberian bantuan Jepang. Tulisan ini menekankan pada tujuan kebijakan luar negeri Jepang di ASEAN utamanya terkait strategic partnership dalam hal keamanan dan militer, disisi lain penelitian ini belum mengakomodir implementasi arah kebijakan luar negeri Jepang dalam kerjasama di bidang non-keamanan utamanya terkait Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative 2.0.

Disisi lain dalam literatur ASEAN Economic Bulletin (1994) berjudul "Japan's Asian Identity: Concerns for ASEAN-Japan Relations" karya Wilfrido V. Villacorta membahas bagaimana Jepang mulai mengidentifikasi dirinya (Jepang) dengan negara tetangga di Asia. Argumen utama dalam penelitian ini menekankan pada pentingnya kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Jepang yang terkait dengan pasar yang luas dan payung keamanan, yang berkontribusi pada hubungan yang langgeng antara Jepang dan AS. Oleh karena itu, hubungan antara Jepang dan ASEAN

perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari framework aliansi antara Jepang dan AS. Tulisan ini hanya menjelaskan sifat politik luar negeri Jepang yang dipengaruhi faktor eksternal yaitu, Amerika Serikat dan belum memberikan perspektif internal dari Jepang itu sendiri terhadap hubungannya dengan negara-negara ASEAN.

Lebih lanjut,, tulisan berjudul "*International Aid For Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia*" yang disusun oleh Bahri (2004) mengenai Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) Jepang kepada Indonesia, terlihat bahwa program bantuan Jepang secara utama didorong oleh kepentingan ekonomi dan strategis daripada kekhawatiran kemanusiaan. Studi tersebut menyoroti bahwa bantuan Jepang erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari Jepang, menunjukkan fokus pada pemeliharaan kepentingan politik dan ekonomi di masa depan. Selain itu, penelitian tersebut menekankan bahwa aliran bantuan Jepang ke Indonesia didorong oleh pragmatisme, dengan pertimbangan diplomatik dan strategis memainkan peran penting dalam penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, literatur tersebut menegaskan pentingnya memahami motivasi yang mendasari dan implikasi program ODA Jepang bagi negara penerima seperti Indonesia. Sementara itu, argumen serupa juga berlaku untuk penelitian yang dilakukan oleh Akiko (2000) mengenai ODA sebagai Alat Kebijakan Luar Negeri Jepang yang membahas bagaimana keterlibatan Jepang dalam bantuan ekonomi, khususnya ODA, telah berubah dalam kualitas dan kuantitas, menjadikan Jepang sebagai donor terbesar di dunia pada tahun 1990-an.

Penelitian tersebut menyoroiti dasar pemikiran di balik ODA seiring dengan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Jepang, serta berakhirnya Perang Dingin. Penelitian tersebut juga membahas kebutuhan akan reformasi dan tantangan masa depan ODA Jepang, terutama dalam konteks pembatasan anggaran dan perubahan tujuan kebijakan luar negeri.

Terakhir, literatur berjudul “The Securitization of Japan’s ODA” karya Raymond Yamamoto membahas bagaimana ODA mengalami perubahan tujuan dari yang sebelumnya dilaksanakan untuk tujuan pembangunan ekonomi Jepang menjadi tujuan keamanan nasional dimulai sejak akhir tahun 1990-an. Berbeda dengan periode di mana ODA utamanya melayani kepentingan para pejabat di kementerian terkait ekonomi, setelah tahun 2001, berbagai dewan di dalam Kantor Kabinet menetapkan tugas-tugas ODA sesuai dengan tujuan-tujuan terpisah mereka, termasuk kepentingan keamanan negara. Tulisan ini juga menjelaskan perubahan dalam JICA (Japan International Cooperation Agency) juga memainkan peran penting dalam sekuritisasi ODA. JICA diberikan otonomi yang lebih besar, yang memungkinkan organisasi ini untuk mengkhususkan diri dalam hal-hal yang terkait dengan keamanan. Securitization ODA juga dipicu oleh kewenangan yang diperluas dari perdana menteri, yang diberikan hak dan kesempatan untuk memilih presiden JICA dari antara mereka yang paling berkualifikasi untuk melaksanakan strategi ODA terkait keamanan secara efektif. Tulisan ini memberikan penjelasan mengenai perubahan politik luar negeri Jepang melalui ODA yang mengalami beberapa perubahan termasuk terkait

pragmatisme ekonomi yang telah dilakukan sebelum hadirnya program *industrial human resources development cooperation initiative*. Namun, tulisan ini belum melihat sisi non-material yang mungkin menjadi alasan dibalik perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang.

Oleh karena itu, untuk mengisi *research gap* terdahulu yang belum melihat sisi budaya dan filosofi Jepang untuk menginterpretasikan motif kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara, penulis akan menggunakan konsep Global IR dan filsafat kaizen guna memberikan perspektif baru dalam penelitian kebijakan luar negeri Jepang.

1.5.1 Global IR

Global IR merupakan gagasan yang dibangun oleh Amitav Acharya pada tahun 2014 melalui International Studies Association (ISA). Acharya (2014) dalam bukunya yang berjudul *'The Making of Global International Relations'* menjelaskan kondisi hubungan internasional yang sejak abad 20 didominasi oleh fenomena globalisasi membutuhkan pandangan yang inklusif dalam menilai peristiwa internasional.

Gagasan politik dunia dan istilah "hubungan internasional" telah digunakan untuk mencakup satu dunia hubungan politik internasional. Namun, penting untuk disadari bahwa sistem hubungan internasional dan ranah urusan internasional sangat jauh dari istilah seragam. Pengaruh globalisasi, polisentrisme, dan regionalisasi yang semakin meningkat memiliki dampak besar pada proses global. Pada beberapa masa sejarah, munculnya polisentrisme dan intensifikasi regionalisasi bahkan dapat

menghambat globalisasi, memunculkan konflik, menggoyahkan proses global, atau bahkan menyebabkan krisis (Voskressenski, 2016). Akibatnya, diperlukan adanya kolaborasi lintas wilayah dan restrukturisasi sistem tata kelola global yang berbasis pada habitat peradaban dan budaya. Hal ini membutuhkan pembentukan pasukan makro-regional dan transregional dengan level integrasi yang beragam, yang akan menjadi dasar untuk meningkatkan kerja sama lintas-regional (Coleman, 1998). Kerja sama yang baru ini bersifat kompetitif dan dapat disesuaikan dengan tren global, yang berpotensi mempengaruhi dinamika geopolitik dunia. Perkembangan kompleks di tingkat makro-regional mendorong munculnya pusat-pusat global baru dalam urusan antar wilayah, yang bertujuan menciptakan keseimbangan global melalui kolaborasi. Hadirnya dinamika tersebut membuat teori-teori hubungan internasional dan politik dunia yang ada harus diperluas dan mungkin ditambah untuk memberikan dasar yang kuat bagi konsolidasi sistem tata kelola global, dengan mempertimbangkan beragam model yang diusulkan oleh komunitas internasional (Buzan, 2003).

Konsep *Global IR* muncul sebagai respons terhadap pandangan dominan yang menganggap bahwa ilmu Hubungan Internasional didominasi oleh perspektif Barat, sehingga mengabaikan narasi dan pengalaman yang beragam dari negara-negara non-Eropa. Teori Hubungan Internasional tradisional, yang berakar pada sejarah Barat, secara tidak sengaja memperpetuasi pandangan dunia yang berpusat pada Barat yang

mengabaikan kekayaan sejarah global yang beragam dan memperlakukan negara non-Barat sebagai *blank state* (Acharya, 2014). Meskipun Barat memiliki pengaruh yang signifikan pada abad ke-19, perubahan kelembagaan di daerah jajahan seringkali dipicu oleh faktor lokal daripada pergeseran kekuatan. Aturan pengakuan dan konsep "standar peradaban" dirumuskan ketika koloni-koloni mencari kemerdekaan dari Eropa. Penting untuk mengakui bahwa globalisasi memiliki sifat multisentris pada era modern awal dan sepanjang abad ke-19, meskipun di bawah hegemoni Barat (Voskressenski, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya desentralisasi dalam studi hubungan internasional dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan hubungan internasional di wilayah non-Barat. Tantangan ini kemudian perlu untuk diterima oleh ahli Hubungan Internasional, karena hal ini akan mengubah pemahaman mengenai hubungan internasional di seluruh dunia (Voskressenski, 2016).

Konsep Global IR bertujuan untuk untuk menyeimbangkan kembali sejarah tentang bagaimana masyarakat internasional dibuat, dengan mengambil pandangan yang lebih berbeda, yang mengakui dan menghargai kontribusi unik serta agensi dari semua negara dalam jaringan yang kompleks dalam masyarakat internasional (Acharya A. &., 2010) Global IR menganut istilah "non-Barat" atau "pasca-Barat" bukan sebagai sarana penolakan, melainkan sebagai seruan untuk memperluas cakupan ilmu Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin dan menantang sifat parokialnya. Disisi lain, kemunculan teori IR non-Barat berasal dari

ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap penerapan teori klasik terutama di Asia (Acharya, 2014). Eksplorasi sumber-sumber alternatif teori Hubungan Internasional, seperti sejarah pribumi, filsafat klasik, tradisi keagamaan, dan ide-ide pemimpin nasional pada akhirnya juga menimbulkan signifikansi yang tinggi untuk mengkaji interaksi internasional negara non-Barat (Acharya and Buzan, 2017).

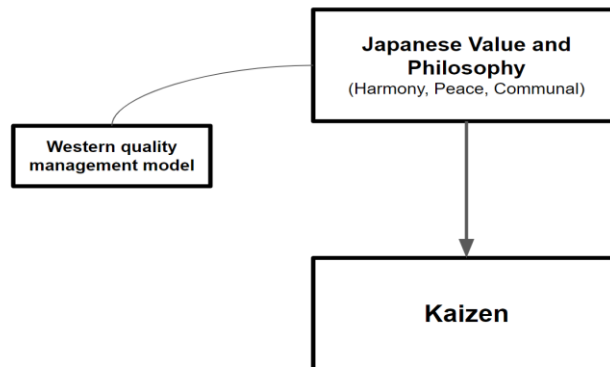
Mengintegrasikan perspektif Global IR dengan konsep teori HI non-Barat memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan inklusif dalam memandang hubungan internasional. Perspektif Global IR mengajak untuk mengakui kontribusi dan pengalaman yang beragam dari negara-negara non-Barat, serta untuk memperluas cakupan ilmu Hubungan Internasional agar tidak terpaku pada pandangan yang berpusat pada Barat. Sebagai contoh, dalam konteks Asia, munculnya teori IR non-Barat menjadi respons terhadap ketidakpuasan terhadap penerapan teori klasik yang dianggap kurang relevan dalam konteks regional tersebut (Acharya A. a., 2017). Beberapa akademisi seperti Takdjbakhsh (2009) mencoba menyajikan pandangan baru tentang Islam atau Takashi Inoguchi (2009) yang membahas mengenai hubungan internasional dari perspektif Jepang. Dengan demikian, pemahaman yang lebih luas dan beragam tentang hubungan internasional dari perspektif non-Barat menjadi sebuah terobosan yang mampu meningkatkan pluralisme dalam hubungan internasional.

1.5.2 Filsafat Kaizen sebagai Perspektif Jepang

Kebijakan luar negeri Jepang telah dipengaruhi secara signifikan oleh tradisi filosofis yang mengakar dan nilai-nilai inti sepanjang sejarahnya. Filosofi Jepang telah memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan negara terhadap hubungan internasional, memandu interaksinya dengan komunitas global, dan membentuk Perpaduan filosofi dan nilai-nilai telah membentuk kerangka kerja unik yang telah menentukan lintasan kebijakan luar negeri. Jepang Filsafat Jepang mencakup berbagai aliran pemikiran, antara lain Shintoisme, Budha, Konfusianisme, dan Bushido masyarakat Jepang yang merupakan seperangkat nilai fundamental yang secara konsisten menginformasikan keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut (Tetsurō, 1996). Di jantung filosofi Jepang terletak rasa hormat yang mendalam terhadap harmoni, keseimbangan, dan keterkaitan. Konsep '*Wa*' yang mengacu pada harmoni dan perdamaian (Hajime, 2002) telah menjadi pusat pendekatan kebijakan luar negeri Jepang. Merangkul prinsip *Wa*, Jepang berusaha untuk membangun dan memelihara hubungan damai dengan negara lain filosofi harmoni ini memandu diplomasi, dialog, negosiasi, dan kompromi sebagai alat penting untuk resolusi konflik. Fokus pada introspeksi dan refleksi diri telah mempengaruhi sikap kebijakan luar negeri Jepang. Konsep "*kokoro*" atau hati dan pikiran mewakili sifat batin seseorang untuk memahami, mempertimbangkan konteks sejarah, kepekaan budaya, dan perspektif beragam bangsa lain (Kasulis, 2008).

Selain itu, filosofi Jepang menanamkan rasa budaya yang kuat, identitas dan pelestarian. Konsep "Nihonjinron" menekankan karakteristik unik orang Jepang dan budaya mereka, kebanggaan warisan budaya telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang, menumbuhkan keinginan untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai Jepang, tradisi, dan kepentingan di panggung global.

Meskipun filosofi Timur sering dikaitkan hanya kepada pemahaman intuitif dan holistik, asumsi bahwa filosofi ini tidak memiliki kedalaman intelektual tidaklah benar. Filsuf Jepang Yukichi Fukuzawa menjelaskan Jepang sebagai "*the brain of the west, the heart of the east*" yang berarti Jepang tidak semata-mata hanya mendasarkan keputusannya pada pemahaman holistik, tetapi juga pendekatan rasional. Misalnya, setelah perang dunia II Jepang mulai menyerap beberapa teknik asing dan pemikiran barat tentang bagaimana ekonominya bisa kembali pulih pasca kekalahan perang dunia II. Pada tahun 1950-an, pasar dunia menganggap produk buatan Jepang sebagai "harga rendah, kualitas rendah", didorong oleh rasa urgensi untuk mengejar ketinggalan industri, Jepang mempelajari manajemen kualitas gaya Amerika dari Dr. W. E. Deming dan Dr. J. M. Juran, yang disesuaikan dengan konteks Jepang. Difusi nilai-nilai barat ini kemudian bersatu dengan filosofi dan nilai-nilai Jepang yang kemudian dikenal menjadi suatu filosofi bernama "kaizen" yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Jepang (Janjic, 2019).



Gambar 1.2 Struktur pemikiran Kaizen

Sumber: Imai (1986) melalui buku '*Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*' yang diolah oleh penulis

Istilah "kaizen" dalam bahasa Sino-Jepang merupakan gabungan dari dua kata bahasa Jepang ("kai" dan "zen") "perubahan yang baik" dan tidak secara intrinsik mengindikasikan "berkelanjutan" sebagaimana tertera di dalam kamus atau digunakan sehari-hari di Jepang. Meskipun secara harfiah berarti "*Good Change*" Kaizen seringkali dirujuk sebagai bentuk '*continuous development*' atau perbaikan berkelanjutan, praktik penggunaan "kaizen" untuk merujuk pada teknik perbaikan industri atau bisnis di Jepang telah menjadi kebiasaan (Janjic, 2019). Cara berpikir Kaizen berorientasi pada proses untuk terus menerus berkembang dengan tujuan yang lebih dari sekadar peningkatan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan produktifitas suatu output. Kaizen mencapai peningkatan melalui langkah-langkah kecil dan terus menerus, tidak seperti inovasi yang dramatis dan mengesankan, serta memerlukan investasi dalam teknologi dan peralatan baru. Ini menyiratkan perubahan

yang non-radikal yang merupakan hasil dari ide-ide inovatif yang berlangsung dari waktu ke waktu tanpa investasi modal besar (Kumar, 2017).

Kaizen lebih dari sekedar cara sukses atau model manajemen, Kaizen memiliki nilai pendidikan yang mempengaruhi nilai moral seseorang yang dikategorikan menjadi lima; (1) Menyortir (seiri) (2) Penguatan (Seiton) (3) Membersihkan (seiso) (4) Standarisasi (Seiketsu) (5) Mempertahankan (shitsuke) (Arsyad, 2021). Kaizen dalam penerapannya dapat meningkatkan rasa “kemanusiaan” tempat kerja, menghindari beban kerja yang berlebihan ("muri"), melatih individu untuk menggunakan metode ilmiah untuk melakukan penelitian pada pekerjaan mereka sendiri, dan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses bisnis. Kaizen mendefinisikan pencapaian “*ideal life*” apabila perkembangan terus dilakukan untuk mencapai harmoni. Kaizen sebagai berkat kesederhanaan dan kepraktisannya menjadikan alat yang harmonis yang bisa berlaku untuk semua tingkatan, termasuk untuk kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi hingga level kebijakan suatu negara.

Nilai-nilai kaizen diimplementasikan tidak terbatas pada pengusaha melainkan pemerintah Jepang dalam membangun politik dan ekonomi pasca perang dunia II melalui kebijakan yang lebih inklusif dan *human-centric*. Salah satu contohnya adalah pendekatan konsensus dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintah Jepang berusaha untuk

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Filosofi Kaizen juga mencerminkan budaya kerja Jepang yang terkenal dengan ketelitian, disiplin, dan kualitas (Elkins, 2007). Prinsip ini tercermin dalam pendekatan Jepang terhadap pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Pemerintah Jepang berusaha untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui perbaikan yang berkesinambungan.

1.5.3 Kaizen vs Liberalisme

Teori-teori tradisional atau *western theory* dalam studi hubungan internasional, telah lama menjadi pijakan penting dalam memahami interaksi negara-negara di panggung dunia. Pendekatan rasional sebagai pendekatan yang paling populer umumnya berfokus pada analisis yang didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian yang dihadapi oleh negara dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi. Misalnya, Liberalisme yang telah menjadi salah satu teori yang sangat berpengaruh dan populer dalam studi hubungan internasional, dan menjadi kiblat bagi para akademisi dan analis dalam memahami dinamika global. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh liberalisme. Dengan menekankan pentingnya kebebasan individu, partisipasi demokratis, dan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan antara negara, liberalisme menawarkan perspektif optimis dan inklusif terhadap kerjasama internasional (Kant, 1991). Selain itu,

liberalisme juga memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan analisis tentang peran lembaga-lembaga internasional dalam mempromosikan perdamaian, menyelesaikan konflik, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Doyle, 1986).

Teori liberal didasarkan pada perspektif politik *bottom-up*, yang mengutamakan tuntutan individu dan kelompok masyarakat daripada proses politik. Tindakan politik dilihat sebagai bagian dari masyarakat sipil domestik dan transnasional, yang terdiri dari individu-individu dengan beragam preferensi, komitmen sosial, dan sumber daya yang tersedia (Moravcsik, 1997). Rasionalitas diasumsikan dalam mengejar kesejahteraan material dan ideal. Selain sisi materialistiknya, pandangan pentingnya Partisipasi aktif dari individu menjadi sebuah nilai kesamaan antara liberalisme barat dengan filsafat kaizen. Kaizen mengakui bahwa setiap individu di dalam organisasi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan kontribusi positif dalam mencapai perbaikan (Arsyad, 2021). Dalam pendekatan kaizen, individu dihargai sebagai sumber daya yang berharga dan diakui bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan mereka sendiri. Selain itu, dalam filsafat kaizen, individu diberdayakan dan diberikan tanggung jawab dalam mengidentifikasi dan melaksanakan perubahan yang diperlukan (Berhe, 2021).

Selain mengakui pentingnya individu, Liberalisme dan Kaizen juga mengakui kerjasama sebagai sesuatu yang penting dalam dunia internasional. Keduanya setuju bahwa kerjasama antar negara dapat dilakukan dan anarkisme dapat dihindari. Kaizen melihat negara lain sebagai sumber pembelajaran dan kolaborasi. Ini menekankan adaptasi, menghormati keragaman, dan peningkatan berkelanjutan sebagai prinsip panduan saat terlibat dengan negara lain (Berhe, 2021). Dalam interkasinya dengan negara lain, kaizen melihat negara lain sebagai "*team*" yang dengan kerjasama tersebut mereka akan mewujudkan tujuan bersama. Hal ini diibaratkan dengan aplikasi kaizen dalam manajemen perusahaan dimana suatu team terdiri dari manajer dan *staff* yang memiliki tugasnya masing-masing demi mencapai suatu target tertentu.

Disisi lain, liberalisme menganggap definisi kepentingan aktor sosial sangat penting. Mereka menolak kepercayaan utopis bahwa keharmonisan dapat tercapai secara otomatis dengan hadirnya kepentingan kolektif (Moravcsik, 1997). Liberal percaya bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh berbagai pola preferensi negara, yang mendorong konflik, kerja sama, dan tindakan kebijakan luar negeri. Setiap negara bagian berusaha mewujudkan preferensi uniknya sambil mempertimbangkan preferensi negara bagian lain sebagai kendala. Teori liberal menekankan konvergensi parsial preferensi negara, memandangnya sebagai masalah tindakan kolektif daripada mengasumsikan harmoni yang lengkap (Moravcsik, 1997). Oleh karena itu, liberalisme melihat negara

lain sebagai “*partner* yang menguntungkan” demi mencapai tujuan negaranya (Schmidt, 2013). Disisi lain, kaizen yang melihat suatu kerjasama memiliki satu tujuan bersama untuk dicapai, liberalisme tidak pernah menyamakan tujuannya dengan negara mitra, liberalisme berfokus pada bagaimana kerjasama dapat dilakukan dengan bayaran dan manfaat yang adil pada kedua belah pihak, meskipun dalam praktiknya distribusi *power* dapat menghambat hal tersebut (Schmidt, 2013).

Perbedaan antara Kaizen dan Liberalisme dapat dilihat dari bagaimana kedua perspektif memandang negara lain serta tujuan yang dilakukan dibalik kerjasamanya. Kaizen membawa nilai-nilai komunal dan kebersamaan, membuatnya melihat orientasi kerjasama yang memiliki tujuan bersama, sedangkan kerjasama antar negara yang didefinisikan oleh liberalisme masih mengedepankan untung-rugi seperti bentuk kerjasama apa dan bagaimana yang paling bisa menguntungkan suatu negara (Moravcsik, 1997). Oleh karena itu, kaizen mengandung nilai-nilai altruisme alih-alih sekedar menguntungkan secara penilaian rasional. Interaksi dengan negara lain dianggap memiliki signifikansi penting dalam mengemban nilai-nilai harmoni yang merupakan pijakan sentral dalam budaya Jepang, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Jepang memiliki dorongan untuk mempromosikan nilai kaizen sebagai bentuk peduli dan ajakan kepada negara lain untuk terus berkembang (Inoguchi, 2009). Oleh karena itu kaizen menjadi dasar pemikiran yang dapat mengakomodasi perilaku Jepang yang didorong oleh nilai-nilai

(*value-driven*) tanpa sepenuhnya membuang pikiran rasional dibandingkan teori rasional barat yang sebagian besar berputar pada perhitungan untung-rugi.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mempengaruhi hubungan dan interaksi dengan negara lain, serta mencapai tujuan nasionalnya di tingkat internasional (Hermann, 1990). Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang lebih besar, seperti kekuatan ekonomi dan militer, serta dinamika hubungan internasional (Modelski, 1962). Kebijakan luar negeri melibatkan strategi politik, diplomasi, ekonomi, militer, dan budaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah negara tersebut. Dengan demikian, kebijakan luar negeri adalah upaya aktif untuk mempromosikan kepentingan nasional dan membangun hubungan bilateral atau multilateral yang saling menguntungkan antara negara-negara.

1.6.2 Budaya

Budaya merujuk pada seperangkat nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, tradisi, bahasa, simbol, serta praktik-praktik yang dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Budaya merupakan cara hidup yang diwariskan dan dipelajari dari generasi ke generasi, serta

membentuk identitas dan pandangan dunia seseorang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti seni, musik, tarian, agama, gastronomi, adat istiadat, dan sistem sosial. Budaya juga dapat mencakup perilaku komunikasi, pola-pola hubungan interpersonal, serta sistem nilai yang menjadi landasan bagi tindakan dan pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat (Fenn, 2017). Budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, serta mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu komunitas.

1.6.3. Kaizen

Kaizen yang berarti ‘continuous improvement’ dikembangkan pasca kekalahan Jepang pada perang dunia II. Cara berpikir Kaizen berorientasi pada proses untuk terus menerus berkembang yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan produktifitas suatu output (Recht, 1998). Kaizen sebagai berkat kesederhanaan dan kepraktisannya menjadikan alat yang harmonis yang bisa berlaku untuk semua tingkatan, termasuk untuk kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi hingga level kebijakan suatu negara. Nilai-nilai turunan kaizen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah harmoni, efektivitas, incremental dan keterlibatan atau partisipasi.

1.6.4. Altruisme

Altruisme didefinisikan sebagai sebuah aksi yang menguntungkan ‘lainnya’ tanpa menguntungkan pihak pertama (Hardin, 1977). Dalam

konteks Hubungan Internasional, altruisme seringkali dikaitkan dengan hadirnya bantuan luar negeri meskipun motif altruisme suatu negara itu sendiri memiliki banyak keterbatasan dalam praktiknya (Hardin, 1977). Dalam budaya Jepang terdapat sebuah konsep bernama 'Omoiyari' yang dapat diartikan sebagai konsep altruisme, simpati, empati dan perilaku mementingkan orang lain (Hara, 2006). Oleh karena itu konsep altruisme dalam hubungan negara pada penelitian ini akan menggabungkan konsep hardin (1977) dan Omoiyari dari Jepang yaitu tindakan untuk memahami dan mengutamakan '*needs*' dari pihak lain (negara penerima) meskipun tidak menguntungkan pihak pertama (negara pemberi).

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berasumsi filsafat kaizen dapat menjelaskan perubahan kebijakan Jepang terhadap ASEAN. Nilai-nilai pengembangan, kemajuan, dan proses yang dibawa oleh Kaizen termanifestasi oleh perilaku luar negeri Jepang yang cenderung bersifat altruis dan mengedepankan '*continuous development*' alih-alih eksploitatif. Disisi lain, Jepang mulai mengidentifikasikan dirinya dengan negara Asia lain yang membuat hubungan Jepang-ASEAN semakin membaik, Jepang yang secara historis memiliki riwayat kehancuran besar pada negara nya berkeinginan untuk membantu mengembangkan sesama nya sebagai implementasi dari *continuous development* sekaligus mewujudkan "*ideal life*" penuh dengan harmoni dan perdamaian yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai kehidupan

Jepang. Oleh karena itu, meskipun Jepang memiliki cukup spesifikasi dan kemampuan untuk bersikap eksploitatif terhadap negara ASEAN, Jepang memilih untuk mengedepankan kemajuan ASEAN terutama dalam bidang ekonomi demi terciptanya perkembangan berkelanjutan secara internasional.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek yang dapat berbentuk perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan (Moleong, 2005). Penelitian dilakukan baik secara holistic maupun dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dalam suatu konteks khusus yang alamiah.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Yin (2009) mendefinisikan studi kasus sebagai penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian studi kasus, berbagai metode pengumpulan data digunakan, karena melibatkan studi mendalam tentang suatu fenomena. Studi kasus dapat bersifat deskriptif dan eksplanatori (Yin, 2014). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan eksplanatori untuk mencari faktor-faktor penyebab yang menjelaskan fenomena tertentu. Fokus utama dari studi kasus semacam itu adalah menjelaskan

'mengapa' dan 'bagaimana' kondisi tertentu terjadi, yaitu, mengapa urutan peristiwa tertentu terjadi atau tidak terjadi (Yin, 2014).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada interaksi Jepang di 11 anggota ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Timor Leste. Mengenai batas waktu, penelitian ini akan berlangsung mulai dari tahun 1980 hingga 2023. Lingkup ini ditentukan berdasarkan fakta bahwa Jepang meningkatkan hubungannya dengan anggota ASEAN yang disebutkan pada tahun 1980, yang ditandai oleh peningkatan FDI Jepang ke negara anggota ASEAN pada tahun 1980. Sementara itu, tahun 2023 dipilih karena interaksi Jepang dan ASEAN masih berlanjut, terutama melalui program Industrial Human Resources Development Cooperation Initiatives 2.0.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini mencakup kebijakan Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative, kebijakan luar negeri Jepang, nilai dan budaya Jepang, dan negara anggota ASEAN.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa simbol, frasa, label dan teks tertulis yang terdapat di dalam peraturan kebijakan luar negeri, teks pidato dan KTT Jepang-ASEAN, piagam Kerjasama, pemberitaan dalam media massa yang berkaitan dengan topik dan program Industrial

Human Resources Development Cooperation Initiatives 2.0. Narasi- narasi tersebut akan merepresntasikan dan memberikan gambaran akan Tindakan elit politik Jepang dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan luar negerinya pada negara ASEAN.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti Teks Pidato, hasil KTT, buku-buku, laporan, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan *library and desk research*. Dalam memastikan terjemahan yang akurat dalam melihat narasi-narasi kanji Jepang, penulis mengumpulkan data yang akurat melalui sumber terjemahan resmi seperti web internasional pemerintah Jepang, laporan Kementerian luar negeri Jepang, dan web resmi ODA dan JICA. Terakhir, penulis memastikan terjemahan narasi yang digunakan kepada *native* yang mempelajari kesastraan Jepang.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

LeCompte dan Schensul (1999) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengolah data menjadi sebuah narasi dan interpretasinya. Dengan kata lain, analisis data merupakan proses mereduksi jumlah data yang dikumpulkan untuk memahaminya secara menyeluruh (Kawulich, 2014). Penelitian ini

memanfaatkan metode analisis data dengan mengaplikasikan analisis diskursus atau wacana yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Fokus analisis ini terletak pada aspek bahasa sebagai objek kajian. Bahasa dalam konteks ini merujuk pada wacana, sebuah struktur pemaknaan yang memiliki kapasitas untuk membentuk realitas sosial dan senantiasa memiliki hubungan yang erat antara pernyataan (teks) dan konteks (praktik). Wacana pada dasarnya adalah sebuah sistem produktif yang mampu menciptakan subjek dan otoritas untuk berbicara dan bertindak. Selain itu, wacana memiliki kemampuan untuk membentuk berbagai jenis pengetahuan praktis dan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai pola berpikir serta tindakan politik (Lundborg, 2015).

1.8.8 Kualitas Data

Data diperoleh melalui analisis kredibilitas dari pihak yang berkaitan langsung dalam pembuatan kebijakan luar negeri Jepang utamanya terkait program Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative 2.0. di wilayah ASEAN. Pihak-pihak tersebut direpresentasikan oleh sumber terpercaya seperti situs resmi pemerintah, JICA, dan ODA. Penelitian ini turut melihat *historical situatedness* atau latar belakang historis yang membentuk sikap negara, terutama elit politik dalam menentukan kebijakan luar negerinya.